

**Praktik Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 terhadap Pengelolaan sampah di Desa Babakan Kecamatan Ciparay**

**Sajidin<sup>1</sup>, Shifa Aulia<sup>2</sup>, Nurul Aini<sup>3</sup>, Siti Rahmah Nurul Aulia<sup>4</sup>, Muhammad Nazwan<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [sajidin@uinsgd.ac.id](mailto:sajidin@uinsgd.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [shifaaulia978@gmail.com](mailto:shifaaulia978@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [nuruaulia290@gmail.com](mailto:nuruaulia290@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [nurulaini31@gmail.com](mailto:nurulaini31@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [mnazwan123@gmail.com](mailto:mnazwan123@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini mengevaluasi implementasi peraturan daerah (PERDA) mengenai pengelolaan selama kegiatan kuliah kerja nyata (KKN). Fokus utama penelitian ini adalah memahami penerapan perdda di lapangan, mengidentifikasi di lapangan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan menemukan Solusi yang diterapkan oleh Masyarakat dan mahasiswa (KKN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi langsung dan analisis dokumentasi. Data dikumpulkan melalui pengamatan proses pengelolaan sampah dan studi terkait, seperti Salinan perda dan laporan kegiatan KKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perda mengalami beberapa kendala, termasuk kurangnya kesadaran Masyarakat dan keterbatasan fasilitas. Namun, berbagai berbagai solusi telah diterapkan, seperti pelatihan dan penyuluhan kepada Masyarakat serta perbaikan infrastruktur pengelolaan sampah. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas implementasi perda dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan dalam pengelolaan sampah selama kegiatan KKN.

**Kata Kunci:** Peraturan, Pengolahan Sampah, KKN Sisdamas

**Abstract**

*This research evaluates the implementation of regional regulations (PERDA) regarding management during real work lecture activities (KKN). The main focus of this research is understanding the implementation of regional regulations in the field, identifying them in the field, identifying the challenges faced, and finding solutions that are implemented by the community and students (KKN). This*

*research uses a qualitative approach with direct observation methods and documentation analysis. Data was collected through observing the waste management process and related studies, such as copies of regional regulations and KKN activity reports. The research results show that the implementation of regional regulations experiences several obstacles, including a lack of public awareness and limited facilities. However, various solutions have been implemented, such as training and outreach to the community as well as improving waste management infrastructure. This research provides insight into the effectiveness of regional regulation implementation and recommendations for future improvements in waste management during KKN activities.*

**Keywords:** *Regulations, Waste Processing, KKN Sisdamas*

## **A. PENDAHULUAN**

Pengelolaan sampah merupakan tantangan signifikan yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Bandung dan sekitarnya. Dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, volume sampah yang dihasilkan meningkat secara drastis, memberikan dampak serius pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif menjadi prioritas utama dalam upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Masalah pengelolaan sampah di Bandung mulai mencuat pada tahun 1990-an, seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri. Sistem pengelolaan sampah yang mengandalkan pembuangan di tempat pembuangan akhir (TPA) sering kali tidak memadai, menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah kota mulai memperkenalkan berbagai kebijakan dan regulasi. Fatwa dari Lembaga Pengkajian Hukum dan Kebijakan (LPHK) juga menegaskan, "Perda yang baik memerlukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat serta keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan dalam pengelolaan sampah."

Penelitian ini berjudul "Praktik Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 terhadap Pengelolaan Sampah di Desa Babakan Ciparay". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Perda Nomor 15 Tahun 2012 dalam pengelolaan sampah di Desa Babakan Ciparay. Fokus utama penelitian ini

adalah untuk memahami bagaimana Perda diimplementasikan di lapangan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan mahasiswa KKN, serta mengeksplorasi solusi yang diterapkan dalam praktik pengelolaan sampah. Metode penelitian ini meliputi observasi langsung terhadap kegiatan pengelolaan sampah dan analisis dokumentasi terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas implementasi Perda di Kabupaten Bandung dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan sampah di masa depan.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi penerapan PERDA Bandung mengenai pengelolaan sampah dalam kegiatan KKN, yang dilaksanakan di desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Penelitian dilaksanakan di desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Bandung. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi tempat pelaksanaan KKN dan merupakan area yang menerapkan PERDA tentang pengelolaan sampah. Data primer diperoleh melalui observasi yaitu pengamatan langsung selama kegiatan KKN untuk menilai penerapan PERDA

Dan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, yaitu dokumen terkait PERDA Bandung tentang pengelolaan sampah dan laporan KKN. Adapun secara observasi: melakukan mengamati secara langsung proses pengelolaan sampah di lapangan selama KKN, mencatat praktik, interaksi Masyarakat, dan penerapan PERDA. Dan dokumentasi melalui mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang relevan seperti Salinan PERDA, laporan kegiatan KKN, dan catatan terkait pengelolaan sampah. Serta analisis tematik yakni menyusun dan menganalisis data dan observasi dan dokumentasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan penerapan PERDA dan tantangan yang dihadapi.

## **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Desa Babakan di Kecamatan Ciparay melaksanakan program praktik penerapan **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012** tentang Pengelolaan Sampah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan mengajak

warga desa dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan.

Adapun tujuan dari kegiatan tersebut diantaranya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, memperkenalkan langkah-langkah pengelolaan sampah yang sesuai dengan Perda No. 15 Tahun 2012, mengurangi jumlah sampah yang dibuang sembarangan di lingkungan Desa Babakan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik. Dalam Pelaksanaan kegiatan diantaranya Sosialisasi Perda Sosialisasi ini melibatkan pemaparan isi dan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 Tahun 2012, yang dilakukan oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan perangkat desa setempat. Masyarakat diberikan penjelasan mengenai kewajiban dan peran mereka dalam pengelolaan sampah, serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian Pelatihan Pengelolaan Sampah Pelatihan ini mencakup teknik-teknik pemilahan sampah organik dan anorganik, pembuatan kompos dari sampah organik, serta daur ulang sampah anorganik. Pelatihan ini melibatkan kelompok ibu rumah tangga, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi.

Dan aksi bersih Desa sebagai tindak lanjut dari sosialisasi, warga diajak untuk melakukan aksi bersih desa secara gotong royong. Kegiatan ini melibatkan pemungutan sampah di tempat umum seperti jalan desa, selokan, dan lapangan desa, serta pemasangan tempat-tempat sampah di lokasi strategis. Setelah terealisasinya program tersebut diharapkan terciptanya budaya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan berperan aktif dalam pengelolaan sampah, Pengurangan jumlah sampah yang dibuang sembarangan dan peningkatan jumlah sampah yang didaur ulang, terbentuknya bank sampah di Desa Babakan yang dikelola oleh warga desa serta peningkatan kualitas

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Tantangan dalam Menerapkan PERDA Kab. Bandung No. 15 Tahun 2012 di Desa Babakan Ciparay**

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah,<sup>1</sup> merupakan langkah penting dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih baik.<sup>2</sup> Namun, dalam penerapannya di lapangan, khususnya di Desa Babakan Ciparay, tentu saja terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Babakan Ciparay menghadapi berbagai tantangan kompleks. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sulit diubah, terutama di kalangan masyarakat yang kurang teredukasi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti minimnya tempat pembuangan sampah yang memadai dan kurangnya fasilitas pengolahan sampah, menjadi penghambat yang signifikan.

Lemahnya penegakan hukum juga turut memperparah masalah, di mana sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar seringkali tidak efektif. Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan penting, mengingat sebagian masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengelola sampah secara mandiri. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah dan perubahan kebijakan pemerintah yang dinamis juga turut mempengaruhi keberhasilan penerapan Perda tersebut. Tantangan-tantangan ini saling terkait dan memerlukan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor swasta.<sup>3</sup>

Pengelolaan sampah di Desa Babakan Ciparay menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, mencerminkan masalah yang juga dialami oleh banyak desa di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan, banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan lahan terbuka, yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah juga menjadi masalah utama. Desa ini belum memiliki sistem pengelolaan sampah terpadu yang memadai, seperti tempat pembuangan sementara (TPS) yang terorganisir atau

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah <sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah <sup>3</sup> Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Refika.

program daur ulang yang efektif. Akibatnya, sampah sering menumpuk di area tertentu tanpa pengelolaan yang tepat.<sup>4</sup>

Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun tenaga kerja, membuat desa sulit menerapkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Desa Babakan Ciparay juga menghadapi kendala dalam hal pengelolaan sampah organik dan anorganik, karena tidak ada pemisahan sampah dari sumbernya. Kurangnya edukasi mengenai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan memperburuk situasi, di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami pentingnya memilah sampah dan memanfaatkan limbah organik untuk kompos.

Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Bantuan dari pemerintah sering kali tidak merata dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat pedesaan. Program-program pemerintah yang ada, seperti bank sampah, belum berjalan optimal karena minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya tenaga ahli untuk mendukung implementasi program tersebut.<sup>5</sup>

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menghambat terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat di Desa Babakan Ciparay. Solusi jangka panjang yang melibatkan pendidikan lingkungan, peningkatan infrastruktur, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di desa ini.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Babakan Ciparay masih menghadapi berbagai kendala, meskipun regulasi ini dirancang untuk menjadi solusi utama dalam menangani permasalahan sampah di tingkat desa. Secara garis besar, Perda ini mengatur tentang pengelolaan sampah mulai dari pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Namun, di Desa Babakan Ciparay, implementasi Perda ini belum berjalan optimal. Masyarakat secara umum belum sepenuhnya memahami atau bahkan menyadari isi dari peraturan tersebut. Kurangnya sosialisasi yang intensif dari pemerintah desa maupun Kabupaten Bandung menyebabkan banyak warga yang masih belum

---

<sup>4</sup> Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media

<sup>5</sup> Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

mengetahui tata cara pemilahan sampah yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam Perda tersebut.

Selain itu, meskipun Perda tersebut mewajibkan pemisahan sampah organik dan anorganik serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebiasaan lama membuang sampah sembarangan masih banyak terjadi. Sistem pengangkutan sampah yang seharusnya dikelola dengan baik juga belum sepenuhnya diterapkan. Sebagian besar rumah tangga di Desa Babakan Ciparay tidak memiliki akses rutin ke layanan pengangkutan sampah, sehingga sampah menumpuk di area-area tertentu atau dibuang langsung ke sungai dan lahan kosong. Perda ini juga menuntut adanya tempat pembuangan sementara (TPS) dan fasilitas pengolahan sampah di setiap desa, namun fasilitas-fasilitas tersebut masih minim di Babakan Ciparay, membuat penerapan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur sulit terlaksana.

Dari sisi pemerintah desa, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan besar dalam menjalankan amanat Perda No. 15 Tahun 2012. Meskipun terdapat niat baik untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, implementasi yang konsisten sering kali terkendala oleh kurangnya dana untuk membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Selain itu, tenaga kerja yang terlatih dalam bidang pengelolaan sampah juga terbatas. Pemerintah desa lebih banyak fokus pada masalah-masalah lain yang mendesak, sehingga program terkait pengelolaan sampah sering kali kurang prioritas.

Namun demikian, beberapa upaya sudah mulai dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap Perda ini. Misalnya, sosialisasi tentang pentingnya memilah sampah mulai diterapkan melalui kegiatan PKK dan kerja bakti desa, meskipun masih dalam skala kecil. Ada juga inisiatif dari kelompok masyarakat tertentu yang mulai mengembangkan bank sampah, meski partisipasinya masih rendah. Namun, tanpa dukungan yang lebih kuat dari pemerintah kabupaten dalam bentuk pelatihan, penyediaan fasilitas, serta edukasi yang lebih masif, penerapan Perda No. 15 Tahun 2012 di Desa Babakan Ciparay akan sulit mencapai target yang diharapkan dalam mengatasi masalah sampah. Untuk itu, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di desa ini.

## **Efektivitas Penerapan Perda Bandung No. 15 Tahun 2012 Dalam Mengurangi Volume Sampah di Desa Babakan Ciparay**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu "effective," yang berarti sesuatu yang telah dilaksanakan dengan baik atau berhasil. Dalam Kamus Ilmiah Populer, efektivitas diartikan sebagai pemanfaatan yang tepat, berguna, atau mendukung tercapainya tujuan. Efektivitas mengacu pada ukuran sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai. Efektivitas juga merupakan indikator seberapa jauh target (baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu) dapat direalisasikan. Semakin tinggi persentase target yang dicapai, semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.<sup>6</sup>

Sebagian besar masyarakat di Wilayah Babakan masih tradisional sehingga sulit diberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah. Tradisional disini mereka masih memandang bahwa sampah cukup dengan pola kumpul-buang-bakar. Keadaan seperti ini yang pada akhirnya menjadi awal belum dapat terlaksananya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Babakan.

Dalam Perda No. 15 tahun 2012 pasal 15 disebutkan bahwasannya "Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan sistem pengangkutan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)".<sup>7</sup> Namun pada praktiknya pemerintah setempat tidak maksimal dalam pengangkutan sampah sehingga sebagian masyarakat Desa Babakan Ciparay masih membakar sampah-sampahnya di pekarangan rumah atau lahan kosong di sekitar wilayah desa Babakan

Secara keseluruhan volume sampah di desa Babakan masih tetap tinggi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah di sumber, tidak semua rumah tangga melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik. Sehingga pengelolaan sampah kurang efektif.

Efektivitas Perda sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dan mengurangi sampah di sumbernya. Sejak Perda diberlakukan, beberapa kampanye publik dan program sosialisasi tentang pemilahan sampah telah

---

<sup>6</sup> Raharjo Punto, Konsep Efektivitas, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hal. 23.

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

digalakkan. Di beberapa wilayah, partisipasi masyarakat sudah mulai membaik dengan adanya bank sampah dan program daur ulang di lingkungan sekitar. Meski demikian, partisipasi masyarakat secara menyeluruh masih belum maksimal. Faktor seperti kurangnya sosialisasi yang merata dan rendahnya kesadaran lingkungan membuat implementasi Perda ini tidak konsisten di seluruh wilayah Desa Babakan Ciparay.

Selain karena faktor partisipasi masyarakat kurang efektifnya perda No. 15 tahun 2012 juga dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah setempat melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Perda No. 15 Tahun 2012 memuat sanksi bagi individu atau institusi yang tidak mematuhi aturan, namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih lemah. Banyak kasus pelanggaran yang tidak dikenakan sanksi, atau sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera. Akibatnya, ada kesan bahwa peraturan ini kurang serius ditegakkan, yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dan sektor komersial dalam pengelolaan sampah.<sup>8</sup> Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, pemerintah setempat telah menjalin kerjasama dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa inisiatif telah diluncurkan, seperti program daur ulang plastik, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan promosi gaya hidup ramah lingkungan.

Kolaborasi ini telah memberikan dampak positif, tetapi skalanya masih terbatas. Selain itu mahasiswa yang melakukan KKN di Desa Babakan Ciparay telah melakukan program kerja berupa pembuatan bak pembakaran sampah organik dan anorganik harapannya agar pengelolaan sampah di desa Babakan Ciparay dapat berjalan lebih efektif dan masyarakat memiliki tempat khusus untuk membakar sampah-sampah nya. Untuk meningkatkan efektivitas Perda No.15 Tahun 2012 di Desa Babakan Ciparay , diperlukan langkah-langkah strategis seperti memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, dan menegakkan aturan dengan lebih tegas Kolaborasi lintas sektor juga harus diperluas agar semua pihak dapat berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

---

<sup>8</sup> Hasbullah, Analisis Pengelolaan Sampah di Kota Subulussalam, Jurnal, Fakultas Kesehatan Universitas Sumatera Utara, vol. 4. Bo. 2. Juni 2019,

## DOKUMENTASI



**Gambar 1.** Proses pembuatan plang tulisan organik dan nonorganik dan pembuatan bak sampah



**Gambar 2.** Hasil pembuatan bak sampah KKN 45

## E. PENUTUP

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai wujud pengabdian mahasiswa kepada masyarakat memberikan dampak positif bagi daerah yang dikunjunginya. Program pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh kelompok KKN 45 di RW 13 Desa Babakan berhasil meningkatkan keterampilan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah rumah tangga.

Melalui penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 ini, diharapkan Desa Babakan Kecamatan Ciparay dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan

nyaman. Dengan adanya komitmen bersama, kita mampu menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kualitas hidup warga desa menuju masa depan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). Pengelolaan sampah. *Diklat kuliah TL, 3104*, 5-10.

Heston, Y. P. IDENTIFIKASI MASALAH TATA KELOLA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) TERPUSAT DI KABUPATEN BANDUNG GOVERNANCE PROBLEM IDENTIFICATION OF WASTE WATER TREATMENT INSTALATION (IPAL) IN BANDUNG DISTRICT.

Hendri, W. (2014). Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23-25/DKPP-PKE- I/2012. *Jurnal Selat, 2*(1), 188-200.

Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance, 7*(1), 180-193.

Prihatin, R. B. (2015). Alih fungsi lahan di perkotaan (Studi kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta). *Jurnal Aspirasi, 6*(2), 105-118.

Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandung (Studi Kasus di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana, 2*(1), 1-23.

Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, 5*(1), 71-84.

Silitonga, D. P. (2010). Tahapan perkembangan metropolitan jabodetabek berdasarkan perubahan pada aspek lingkungan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 21*(3), 197-21

